



Criminal Liability of Notary in the Criminal Act of Letter Forgery towards Authentic Deeds

By:

Irsyad Audrian Adhyasta¹, Sri Wiyanti Eddyono²

ABSTRACT

This Legal Research is aimed to understand and to analyze the legal considerations of judges in examining cases of letter forgery involving authentic deeds performed by notaries, as well as the legal considerations of judges regarding the criminal responsibility of notaries for the material accuracy of the deeds they create.

This legal research is descriptive in nature and employs normative legal research or literature review as the research method, supported by interviews with informants to gather and clarify secondary data. The data obtained from this research is analyzed using qualitative methods and presented through descriptive analysis.

The research findings indicate the following: 1) The criminal responsibility of a Notary in cases of letter forgery involving authentic deeds largely depends on the legal considerations of the judge. Disparities in sentencing by judges are influenced by several factors, including the prosecutor's demands, the level of the defendant's culpability, and the impact of the defendant's actions. 2) The criminal responsibility of a Notary concerning the material accuracy of documents or information presented to them is limited, as stated by the maxim and jurisprudence (Supreme Court Decision No. 702 K/Sip/1973), which establish the boundaries of a Notary's responsibility for the material accuracy of statements made by the parties involved. Although a Notary may be involved in cases of document forgery, it does not automatically make them criminally liable for their actions.

Keywords: Criminal Responsibility, Notary, Letter Forgery, Authentic Deeds, Judge's Consideration, Material accuracy of Deed

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2019).

² Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

***Tanggung Jawab Pidana Notaris dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
terhadap Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris***

Oleh:

Irsyad Audrian Adhyasta³, Sri Wiyanti Eddyono⁴

INTISARI

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa perkara pemalsuan surat terhadap akta otentik yang dilakukan oleh notaris, serta pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan tanggung jawab pidana notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya.

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif dengan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang didukung dengan wawancara narasumber untuk menggali dan memperjelas data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1.) Bahwa tanggung jawab pidana seorang Notaris dalam kasus pemalsuan surat yang melibatkan akta otentik sangat tergantung pada pertimbangan hukum hakim. Disparitas hukuman dalam putusan hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, tingkat kesalahan terdakwa, dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa; 2.) Tanggung jawab pidana Notaris terhadap kebenaran materiil dokumen atau keterangan yang dihadapkan kepadanya memiliki batasan sebagaimana dinyatakan oleh adagium dan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973) yang mengatur batasan tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil keterangan penghadapnya. Meskipun seorang Notaris bisa terlibat dalam kasus pemalsuan surat, hal itu tidak secara otomatis membuat Notaris bertanggung jawab secara pidana akan perbuatannya.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Pidana, Notaris, Pemalsuan Surat, Akta Otentik, Pertimbangan Hakim, Kebenaran Materiil*

³ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2019).

⁴ Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.